



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bageko@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Nomor : 005 / 119.11 / 413.021/2025

Lamongan, 27 Juli 2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2025 Bagian
Perekonomian Setda
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah

Kab. Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

NURUL MUKMININ, SE, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741101 199402 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RESIKO

TRIBULAN II



BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251

Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bageko@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	005 / 119.1 / 413.021/ 2025
TANGGAL TERBIT	:	07 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Pelaporan  ANIK FAHZUNI SE. Penata Tingkat . I NIP. 19760810 200901 2 002
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian  ARIP ROHMAN SOLEH. SP Penata Tingkat I NIP. 19850405 201001 1 001
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah  NURUL MUKMININ, SE, MM. Pembina Tingkat I NIP. 19731208 200312 2 004

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Perekonomian mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Perekonomian Setda mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Perekonomian demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Perekonomian, selain itu Bagian Perekonomian juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Perekonomian Setda.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Perekonomian Setda.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;

- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan 2 sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Penanggung Jawab Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian:						
1	Rutin melakukan koordinasi terkait kebijakan yang telah diambil	Rutin memantau pelaksanaan pengendalian resiko	Kepala Bagian Perekonomiann	Tribulan I - Tribulan IV	Tribulan II	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Perekonomian:						
1	Mengupayakan koordinasi terkait realisasi anggaran	Update dan rutin mematau pelaksanaan pengendalian resiko	Kepala Bagian Perekonomiann	Tribulan I - Tribulan IV	Tribulan II	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah (lampiran, form 10 dari simario)

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal 1 terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian										
1	Prosentase Rendah	RSO 24.02 02.70	-	-	-	Nilai Resiko 0%	Mengupayakan dan rutin melakukan koordinasi terkait kebijakan	Tribulan I – Tribulan IV	-	Sesuai Jadwal.
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian:										
1	Prosentase Realisasi anggaran kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan	RSO 24.02 02.70	Januari- Pebruari	Anggaran dialokasikan untuk kegiatan prioritas daerah-	Pelaksanaan kegiatan terlambat	Nilai Resiko 0%	Mengupayakan untuk melakukan koordinasi terkait realisasi anggaran	Januari - Desember	Maret	Sesuai Jadwal.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Bagian Perekonomian sebagai berikut :

- Kurangnya informasi terkait pengambil kebijakan.
- Realisasi anggaran ditentukan BPKAD.
- Hambatan yang menyebabkan pengajuan pencairan kegiatan ditolak oleh BPKAD dikarenakan dokumen pengajuan Bagian pada saat Ketika dilaksanakan pengajuan, data/dokumen pendukung kurang lengkap, hal itu disebabkan karena

Bendahara Pengeluaran Pembantu kurang jeli dan teliti dalam melengkapi dokumen pendukung pengajuan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Perekonomian dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efesien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.